

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2019

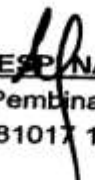
OPD : Inspektorat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.</p> <p>Kegiatan : Review Dokumen Perencanaan dan Laporan</p> <p>Tujuan : Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. - Pemeriksaan Reviu Lap. Keuangan 45 OPD, Reviu LKPD Kabupaten, Reviu RKA Awal dan RKA Perubahan 45 OPD. - Menurut data kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 jumlah Tim Pemeriksaan sebanyak 26 orang yang terdiri dari: 14 orang laki-laki dan 12 orang perempuan 	<p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan lebih memiliki akses yang luas sebagai Tim pemeriksa dalam melakukan tugas pengawasan - Minimnya Informasi tentang Pengarustamaan Gender Bagi Pemeriksa <p>Partisipasi :</p> <p>Perempuan lebih telaten, teliti dan memiliki keuletan</p> <p>Kontrol :</p> <p>Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan</p> <p>Manfaat :</p> <p>Tidak ada pengaruh terhadap proses penyusunan perencanaan dan penganggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pemahaman pemeriksa terhadap implementasi PPRG - Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan - Keterbatasan anggaran - Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya - Telah menempatkan proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan - Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bupati atau aparat pengawas - Perubahan system politik kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan - Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tidak pidana korupsi, transparansi dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat pengawas baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan 45 OPD, LKPD Kabupaten, RKA awal dan RKA Perubahan 45 OPD - Terwujudnya akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Pesisir Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pemeriksaan Review atas Dokumen Perencanaan dan Laporan 45 OPD - Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan - Evaluasi SPIP dan pencegahan korupsi 	<p>Menurut data kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 jumlah Tim Pemeriksaan sebanyak 26 orang yang terdiri dari: 14 orang laki-laki dan 12 orang perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Laporan Keuangan OPD, LKPD Kabupaten dan RKA awal dan RKA Perubahan 45 OPD - Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten. 	<p>Kegiatan: Review Dokumen Perencanaan dan Laporan</p> <p>Input : Rp95.500.000,-</p> <p>Output: Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Keuangan Pemerintah yang direview</p> <p>Outcome: Persentase RKA dan Laporan Keuangan Pemerintah yang baik dan sesuai aturan</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
			dini - Belum pahamnya konsep gender oleh pengelola kegiatan	akuntabilitas - Pelaksanaan PPRG dalam skala nasional belum berjalan maksimal - Sosialisasi untuk para pemeriksa belum maksimal				

Painan, 25 Juni 2018

Inspektur,


Drs. YESP NAWIARSIH
 Pembina Tk.I
 NIP. 19681017 198903 1 003

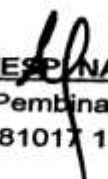
**GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan :	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Reviu Dokumen Perencanaan dan Laporan	
2	Output kegiatan	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Keuangan Pemerintah yang direviu	
3	Analisa situasi		
4	Rencana Aksi	Reviu LKPD Kabupaten, RKA Awal dan Perubahan 45 OPD dan Laporan Keuangan 45 OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemeriksaan Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Laporan 45 OPD. 2. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan 3. Evaluasi SPIP dan pencegahan korupsi
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan		Jumlah Anggaran sebesar Rp95.500.000,00
6	Dampak/hasil Output Kegiatan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang direviu
Program		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
Sasaran Program		Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	
Kegiatan		Reviu Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	
Latar Belakang	Dasar Hukum	APBD	

	Gambaran Umum	-
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Reviu Dokumen Perencanaan (RKA Awal dan Perubahan) dan Pelaporan (LKPD Kabupaten dan Laporan Keuangan OPD)
	Indikator Kinerja	Persentase RKA dan Laporan Keuangan Pemerintah yang baik dan sesuai aturan yang berlaku
	Batasan Kegiatan	12 Bulan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan pemahaman terhadap protap dan aturan dan melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan Aturan yang berlaku.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Memberikan Solusi dan menegaskan kepada OPD dan Pejabat Pengelola keuangan langsung ke OPD masing-masing.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Pesisir Selatan.
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan		Inspektur
Jadwal		Januari s.d. Desember
Biaya		Rp95.500.000,-

Painan, 25 Juni 2018

Inspektur,


Drs. YESP NAWIARSIH
 Pembina Tk.I
 NIP. 19681017 198903 1 003